

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
NONI ERPINA
NIM. E01109064

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang telah dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang oleh pemerintah daerah Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu masih banyaknya terdapat masyarakat usia sekolah 13-15 tahun yang tidak sekolah yaitu sebesar 57,41%. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139) yang mencakup enam variable, yaitu; Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan wajib belajar sembilan tahundi Kecamatan Jagoi Babang belum efektif, hal tersebut dilihat dari kurang memadainya sumberdaya yang tersedia yaitu masih kekurangan tenaga pendidik dan penempatan yang tidak merata, kurangnya dana dan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung kebijakan wajib belajar Sembilan tahun. Selain itu faktor lingkungan ekonomi, sosial yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang.Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang lebih peduli akan peningkatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Sembilan tahun dan perlunya motivasi serta pemahaman baik dari elit politik, pemerintah daerah, tenaga pengajar, maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun

IMPLEMENTATION OF THE 9 (NINE) YEAR COMPULSORY EDUCATION POLICY IN JAGOI BABANG SUBDISTRICT OF BENGKAYANG REGENCY

Abstract

This purpose to provide an understanding of the implementation of policy the obligation studied nine year who have given in subdistrict Jagoi Babang by government in Bengkayang subdistricts and regency. The problems of this research was a lot of society from 13 to 15 did not study was about 57.41%. This research used the teory of Van Meter and Van Horn (in Agustino, 2012:139) there were six variabels, there were measure and the aim of policy, human resources, charecteristic of agent organizer, attidude (disposition), organizers, communication between organization and activity of organizer, and economy environment, social and politic. This research used to kind of policy oresearch descriptive and kualitative approach. The result showed the implementation of policy obligation study nine year in subdistrict Jagoi Babang have not efective yet, it could be seen the lack of human resources and also0 the placemnt could not be spread evenly, less of donation and facility to support the policy obligation nine year. Beside that the factor of economy environment and social also influence to support effective and not efective the impleme3ntation of obligation nine years in Jagoi Babang subdiscrit. The suggestions of this research was experted for society in Jagoi Babang subdistric more care about the importan of education for education for children in age of obligation nine year and need motivation and also understanding from politic elite, distric government, teacher, and parent to give understanding if education very important in daily life

Key words: Implementation, Policy and The Compulsory Study Nine Year

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Apabila tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan semakin bagus. Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Tujuan utama dari kebijakan ini untuk menentukan secara teknis serangkaian kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar dapat mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan. Secara umum, kebijakan ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9

(Sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 34 dijelaskan tentang bagian wajib belajar sebagai berikut.

1. Pemerintah dan pemerintah Daerah
Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun. Dan untuk Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan yang

tertuang dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Sekolah Dasar atau sederajat sampai pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
2. Pelayanan program wajib belajar mengikut sertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Permasalahan implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang menunjukkan bahwa masih kurangnya fasilitas sarana-prasarana untuk mendukung proses pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun di Kecamatan Jagoi Babang, masih banyak lulusan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebanyak 57,41%, kurang meratanya penempatan tenaga pendidik di Kecamatan Jagoi Babang.

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun belum efektif, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi

Babang Kabupaten Bengkayang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Implementasi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun Di Kecamatan Jagoi Babang belum efektif.

Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi pengambil fokus penelitian pada kebijakan, terkait mengenai implementasi kebijakan yang telah dibuat. Adapun aspek praktis diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah, sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun, sehingga dapat melaksanakan kegiatan program sesuai peraturan yang ada dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

B. KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan

Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun pada dasarnya bagian dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional

dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

James Anderson (dalam Agustino, 2012:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Santoso 2009:27) merumuskan kebijakan publik sebagai: “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.

Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2012:6-7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi peraturan tersebut.”

Definisi Lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012: 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimanaterdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan (Agustino, 2012:138).

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar lingkungan kebijakan. sebagaimana dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Santoso, 2009: 42-43) bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang) atau dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. dalam keputusan tersebut teridentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses

implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali perumusan kebijakan, output kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, ketersediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau undang-undang/peraturan yang bersangkutan).

Laster dan Stewart (dalam Agustino, 2012:139) mendefinisikan implemetasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut: Pengukuran keberhasilan implemetasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang

kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139), mengidentifikasi implementasi kebijakan, sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139). Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk diuji akan tetapi lebih sebagai panduan atau pedoman bagi penulis dalam rangka untuk melaksanakan penelitian dilapangan.

Dalam implementasi sebuah kebijakan sering ditemukan implementasi kebijakan tersebut tidak efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) ada enam faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakkan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

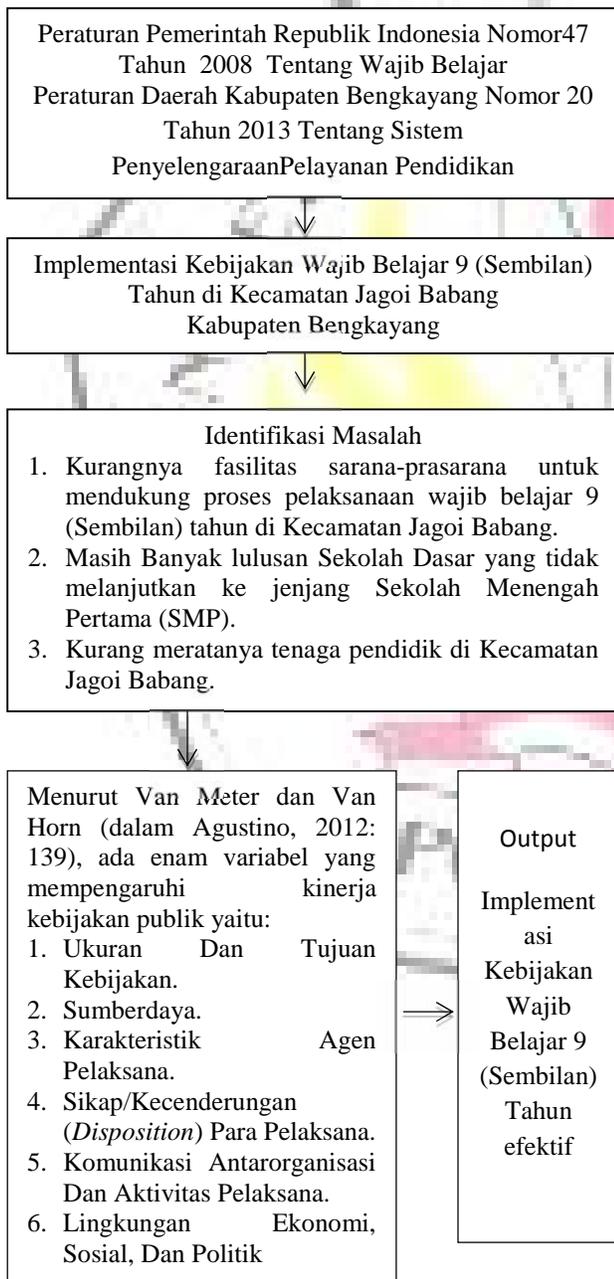
D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dikatakan deskriptif kualitatif karena menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Moleong, 2013:6) Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara keseluruhan dan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan alasan implementasi kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun di lingkungan Kecamatan Jagoi Babang belum efektif. Tercermin dari kurangnya fasilitas sarana-prasarana untuk

C. KERANGKA PIKIR

Berikut ini adalah kerangka pikir dalam penelitian ini:



mendukung proses pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun di Kecamatan Jagoi Babang, masih banyak lulusan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta kurang meratanya penempatan tenaga pendidik di Kecamatan Jagoi Babang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik Analisis Data dengan pendekatan penelitian kualitatif, Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2012:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing /verification*).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di kecamatan jagoi babang kabupaten bengkayang.

Kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun pada dasarnya bagian dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun yang menegaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan. Dengan arah, tujuan dan fungsinya sebagai berikut; Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga memiliki daya saing dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelenggaraan pendidikan berfungsi memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur,

berpengetahuan, berketerampilan, mandiri, sehat jasmani/rohani, memiliki tanggungjawab social kepada masyarakat dan Negara serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139), mengidentifikasi implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa indikator yang menentukan kinerja Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang didasarkan pada teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012: 139) yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Arah kecenderungan para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Sasaran tersebut adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar pihak yang menerima amanah sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Untuk lebih lanjut mengenai hal ini, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Sub Bagian Administasi, umum dan kepegawaian Bapak Moses, S.Pd, yang mengatakan;

“Sasaran dari kebijakan wajib belajar Sembilan tahun ini tentu saja banyak yaitu seperti meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut, meningkat mutu pendidikan seperti sarana-prasarana, meningkatkan jumlah tenaga pendidikan, juga meningkatkan akses agar komunikasi yang

dilakukan lancar dan tidak ada lagi masyarakat yang buta aksara, dan kita berharap kalangan masyarakat kita dapat mencapai target melek aksara (penuntasan buta aksara) dan penuntasan wajib belajar sembilan dasar sembilan tahun. Terlebih untuk daerah perbatasan seperti di Jagoi Babang kita berharap agar kebijakan wajib belajar Sembilan tahun ini dapat terlaksana dengan baik”.

Implementasi akan berjalan efektif bila sasaran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Paparan konsep di atas menjelaskan bahwa memahami isi dan tujuan suatu kebijakan merupakan faktor yang penting agar implementor mengerti menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetisi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Jumlah sumberdaya manusia yang harus disediakan oleh suatu dinas atau organisasi sangat bergantung pada tugas yang harus dilaksanakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang semakin banyak pula jumlah sumberdaya manusia yang harus disediakan untuk menjalankan tugas yaitu mengimplementasikan kebijakan. Sementara itu jika kebijakan yang harus diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit pula jumlah sumberdaya manusia yang diperlukan.

Adapun jumlah pegawai menurut bagian dan bidang yang ada pada kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang 2016, berjumlah 6 orang pegawai yang datanya dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Bagian dan Bidang Tahun 2016

No	Bidang/Bagian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Kepala UPT	1
2	Pengawas sekolah	3
3	Kasubag TU/bendahara gaji	1
4	Bendahara barang	1
Total		6

Sumber: Data hasil olahan peneliti UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

Berdasarkan Perda No 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Bab XII Tenaga Pendidikan Bagian Keenam yaitu Kedudukan Tenaga Pendidikan Pada Satuan Pendidikan;

1. Pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Pegawai Tata Usaha serta dapat diadakan Guru Bimbingan dan Penyuluhan/konselor pustakawan, Laboran Serta Teknisi Sumber Belajar.
2. Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata

Pelajaran, Guru Bimbingan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Kepala Tata Usaha, dan Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan Laboran, dapat diadakan Koordinator Mata Pelajaran dan Teknisi Sumber Belajar.

Peran guru sebagai sumberdaya manusia juga sangat penting dalam implementasi kebijakan wajib belajar, seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran, juga menganalisis perkembangan peserta didik, kebutuhan sumber belajar dan pembelajaran, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta informasi.

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini masih kurang, dan perlunya penambahan tenaga pendidik, demikian juga dengan sumberdaya finansial dan waktu, kurangnya dana dapat mempengaruhi waktu, sehingga implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang ini belum efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma,

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. (Winarno 2007:163). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang memiliki karakteristik yang cukup rapi dan terorganisir. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki dan memiliki tugas pokok yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.

Dalam pelaksana kebijakan wajib belajar ini Karakteristik yang harus dimiliki oleh agen pelaksana ini adalah perlunya sikap disiplin, tanggung jawab organisasi pelaksana, dan ketegasan organisasi pelaksana. Kedisiplinan yang harus dimiliki oleh agen pelaksana meliputi kedisiplinan waktu, kedisiplinan menaati mekanisme dalam melaksanakan kebijakan dan kedisiplinan menaati perintah dari atasan dalam konteks perintah kebijakan dari perintah pemerintah kabupaten. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk realisasi kepatuhan terhadap suatu komitmen yang dibuat sebelumnya. Ketegasan adalah suatu sikap dimana berani menentukan dan memutuskan status suatu persoalan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang mengenai karakter agen pelaksana, adalah sebagai berikut kutipan wawancara:

“Kalau kepala UPT bukan dari guru, saya yakin struktural untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan pasti tidak jalan, karena kita sudah berpengalaman dari menjadi guru, naik jadi kepala sekolah, dan dipercayakan untuk menjadi kepala UPT maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, kalau sanksi belum dapat kita terapkan karena belum ada hukumnya”. (Wawancara tanggal 20 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, karakteristik agen pelaksana berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan mampu untuk menjalankan tugasnya, namun agen tersebut belum tegas terhadap sanksi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negative mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Sikap pelaksana

menjadi variable penting dalam implementasi sebuah kebijakan, hal ini berpengaruh pada kinerja dalam impementasi kebijakan, sikap para pelaksana yang saling mendukung satu sama lain akan berdampak pada tercapainya kebijakan yang ditentukan.

Dalam keadaan seperti ini, van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2007:16) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksana untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana dilapangan, melainkan dipengaruhi juga oleh sikap sikap pendukung orang tua atau masyarakat selaku kelompok sasaran atau target group yang menerima kebijakan tersebut.

Merujuk pada kecenderungan pelaksana (*implementors*), Dinas pendidikan selaku organisasi yang terlibat pada pengimplementasian kebijakan wajib belajar Sembilan tahun, peneliti secara langsung mewawancarai Bapak Moses, S.Pd yang mengatakan bahwa;

“Sebagai pelaksana kebijakan wajib belajar Sembilan tahun ini tentu saja kami menerima kebijakan ini, terlebih kebijakan wajib belajar Sembilan tahun ini adalah

program yang menjadi prioritas program kami, untuk itu sasaran yang harus dicapai tadi yaitu untuk menuntaskan buta aksara, dan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama”.

5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Jika sumber-sumber informasi yang berbeda-beda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi bertentangan, para melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut van Meter dan van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkonsumsikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang berkaitan dengan Komunikasi

Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini komunikasi antar organisasi di sini berjalan baik karena sama-sama respon tersebut adalah untuk membangun daerah perbatasan, baik kerjasama dengan instansi formal maupun informal, seperti komunikasi dengan Dinas Pendidikan, dengan sekolah-sekolah, bahkan untuk menjalankan program ini kami bekerjasama dengan Camat, Polsek, maupun Libas”

Selain itu wawancara juga dilakukan peneliti dengan kepala Sekolah SD Negeri 02 Pareh Kecamatan Jagoi Babang berkaitan dengan Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, mengatakan bahwa:

“Kalau komunikasi dengan pihak UPT sih lancar dan baik, tapi kalau dari Kabupatennyakan jarang, karena dari pihak sana jarang untuk mengawasi di daerah perbatasan, sosialisasi pun kadasng dilakukan setahun sekali, dengan peserta yang sangat sedikit, kadang tu ndak ada gedungnya, jadi pesertanya terbatas saja. Kalau sosialisasi kita disini melalui komite sekolah, tapi ada beberapa komite sekolah yang ndak aktif, padahal kita sangat mengharapkan untuk yang dari kabupaten tu datang untuk melihat kondisi kita di daerah ini, supaya mereka tahu bagaimana kekurangan kita disini”.

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan antar organisasi berjalan dengan baik dan lancar, antara implementor pelaksanaan “dari atas” (*top down*) ke bawah melakukan komunikasi melalui akses pelayanan yang telah disediakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2012:144) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplemntasikan kebijakan harus pula diperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan optimal adalah kondisi lingkungan ekonomi dan sosial peserta didik di daerah tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang berkaitan dengan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik mengatakan bahwa:

“Kondisi ekonomi pariatif ada yang kaya ada yang miskin, kondisi ekonomi disini ada yang ekonominya dikelas bawah, menengah, dan atas, keadaan ini sangat berdampak pada pendidikan, kalau yang kaya seperti pengusaha sih sangat mendukung untuk anaknya sekolah, tapi yang orang tuanya dikelas bawah kadang acuh tak acuh untuk menyekolahkan anaknya, kadang anaknya sendiri memilih untuk kerja untuk membantu mengurangi beban keluarga. Apalagi untuk di Kecamatan ini mayoritas penduduknya sebagai petani, ada juga yang jadi buruh sawit, dan banyak juga yang memilih untuk bekerja di negara tetangga, jadi banyak anak-anak itu yang membantu keluarganya untuk mencari nafkah. Kami sebagai pelaksana di sini juga memohon kepada pemerintah agar lebihherah perbatasan memperhatikan kedaan kami di ini, apabila dibandingkan keadaan pendidikan kita dengan negara tetanga jauh lebih maju dibanding negara kita”.

Lingkungan sosial memberikan dampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang

dijalankan lembaga. Dukungan serta partisipasi lingkungan sosial dalam ranah implementasi kebijakan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara mengenai kondisi sosial kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang, mengatakan bahwa:

“Faktor sosial ini responsip, karena dari kondisi keluarga yang bawah, tengah dan atas tadi, kalau yang ekonominya kaya, dari lingkungan keluarga, tempat tinggalnya sangat mendukung, berbeda dengan yang kelas ke bawah, kadang mereka todak mengerti arti pendidikan, bahkan yang mereka pikirkan sekolah itu tidak penting. Susah juga untuk kita kasih pengertian sama keluarga yang seperti itu”.

Lingkungan politik sangat berpengaruh besar terhadap Implementasi kebijakan wajib belajar Sembilan tahun ini.sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Selain keenam faktor yang disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) yaitu Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut tidak efektif, yaitu faktor infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung jarak tempuh yang harus ditempuh oleh masyarakat, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang lebih memilih bekerja di Negara tetangga yaitu Negara Malaysia serta masih kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan faktor domografi penduduk yang jarak tempuh antar untuk menuju ke sekolah SMP masih cukup jauh.

F. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab yang menghambat dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan

Jagoi Babang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Bahwa sebagai pelaksana kebijakan kepala UPT sebagai pelaksana kebijakan wajib belajar mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan wajib belajar tersebut, dan berupaya agar sasaran dari kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu mamaksimalkan usia wajib belajar untuk mengikuti wajib belajar.

2. Sumberdaya

Bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Jagoi Babang dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini sumberdaya manusia masih kurang, dan perlunya penambahan tenaga pendidik, demikian juga dengan sumberdaya finansial dan waktu, kurangnya dana dapat mempengaruhi waktu dalam jarak tempuh para pendidik dan juga siswanya, juga perlunya penambahan sumberdaya sarana dan prasarana untuk mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan implementasi kebijakan ditunjang dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai, kekurangan-kekurangan sumberdaya

tersebut menghambat dalam pelaksanaan kebijakan sehingga implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang belum terlaksana efektif.

3. Karakteristik agen pelaksana

Bahwa UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan mampu untuk menjalankan tugasnya, namun agen tersebut belum tegas terhadap sanksi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini dan kurangnya tingkat pengawasan baik itu dari Dinas Pendidikan maupun pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Bahwa sikap/kecenderungan para pelaksana sebagai Implementor kebijakan wajib belajar Sembilan tahun pihak Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan menerima dan berusaha semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini mampu untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana.

Bahwa komunikasi yang dilakukan antar organisasi berjalan dengan baik dan lancar, antara implementor pelaksanaan “dari atas” (*top down*) ke bawah kurang komunikasi sehingga implementasi kebijakan ini belum mampu melakukan komunikasi antar organisasi, para pelaksana mutlak perlu dilakukan mulai dari standar dan tujuan program, mekanisme program, pembagian tugas dan kenyamanan persepsi mengenai peran dan fungsi masing-masing pelaksana dalam program. Semuanya harus dikomunikasikan dengan jelas agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan efektif.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

Bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dijalankan oleh pihak unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang. Lingkungan ekonomi, sosial yang kurang mendukung berpengaruh pada tidak efektifnya implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun tersebut.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran agar pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang menjadi lebih baik, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana standar dan tujuan kebijakan wajib belajar sembilan tahun harus mentaati dan mampu untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu perlunya dalam hal ini melihat bagaimana kebijakan ini dapat dilaksanakan kedepannya mampu mencapai sasaran dan tujuan kebijakan agar dapat efektif.
- b. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan jagoi Babang memerlukan sumberdaya yang memadai, baik itu sumberdaya manusia sebagai tenaga pendidik, perlunya untuk penembahan dan pemerataan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan dan lebih membuka akses pelayanan, demikian pula untuk sumberdaya keuangan agar dana yang dikurcurkan di daerah harus jelas

pengunaan dan pengelolaannya dan perlu diperhatikan juga sumberdaya sarana dan prasarananya agar layak digunakan dan memenuhi standar yang ditentukan. Daya dukung sumberdaya manusia, keuangan, waktu, dan fasilitas sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap pelayanan, dengan itu sebagai implemntor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang harus selalu mengecek dan mengontrol secara berkala kekurangan-kekurangan sumberdaya yang ada agar sumberdaya tersebut dapat memenuhi standar dan layak untuk digunakan.

- c. Perlunya karakter yang tegas dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini. Serta perlunya peningkatan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajarsembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang ini, agar implementasi dapat terlaksana sesuai dengan baik.
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sebagai pelaksana kebijakan wajib belajar sembilan tahun, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang perlu bersikap responsip,

yaitu perlunya dukungan antar pihak, baik antar pihak individu maupun antar organisasi dan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Adanya kepatuhan akan kebijakan yang telah ditentukan sehingga pada akhirnya dampak yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini efektif.

e. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana.

Komunikasi yang dilakukan dengan baik antar organisasi pelaksanaan “dari atas” (*top down*) ke bawah patut diabadikan sehingga implementasi kebijakan ini efektif. Para pelaksana mutlak perlu melakukan hubungan yang harmonis mulai dari standar dan tujuan program, mekanisme program, pembagian tugas dan kenyamanan persepsi mengenai peran dan fungsi masing-masing pelaksana dalam program. Semuanya harus dikomunikasikan dengan jelas agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan efektif.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Perlunya kerjasama yang baik antar organisasi baik itu dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten maupun kecamatan

harus berusaha secara maksimal untuk mengatasi masalah kondisi ekonomi agar lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Daerah Kecamatan Jagoi Babang agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.

g. Infrastruktur, budaya dan demografi

Diharapkan agar baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih memperhatikan pembagunan jalan, bangunan sekolah agar masyarakat lebih bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya, dan perlunya motivasi serta pemahaman baik dari tenaga pengajar, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri tentang arti pentingnya pendidikan bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari.

H. REFERENSI

Agustino, Leo, 2012 . *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.

Asmara, Husna, 2015. *Profesi Kependidikan*. Bandung :Alfabeta.

Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexi. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung :Remaja Rosdakarya

Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implemetasi Kebijakan: Konsep*

Dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.

Santoso, Panji. 2009. *Aministrasi Publik : Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung : Alfabeta.

_____, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Sumber Lain

Junaidi. 2011. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun DiKecamatan Sintang Kabupaten Sintang*. Tesis. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.

Parlindungan. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya*. Tesis. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.

Rujukan Elektronik

Kecamatan Jagoi Dalam Angka, diambil pada Tanggal 18 Juni 2015 dari <http://bengkayangkab.bps.go.id>
Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, diambil pada Tanggal 1 November 2015 dari <http://bengkayangkab.bps.go.id>

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Noni Erpina
 NIM / Periode lulus : E01109064 / Periode III
 Tanggal Lulus : 23 Januari 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : nonierpina@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa publika *) pada Program Studi Ilmu Adm Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN
DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BETINGKAYANG

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. Perdi, MAB
 NIP. 197208052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 4 APRIL 2017


 Noni Erpina
 NIM E.01109064

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)